

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal at-Taturk melalui Majelis Nasional Turki menetapkan penghapusan Khilafah dan pengusiran Khalifah saat itu sekaligus menjadi yang terakhir, yakni Abdul Majid II ke luar Turki. Dengan demikian berakhirilah sistem Khilafah yang selama ini menyertai umat Islam. Berita tentang penghapusan dan pengusiran yang dilakukan oleh Kemal Ataturk ini segera menyebar ke luar Turki dan mengejutkan dunia Islam. Kemudian umat Islam di berbagai belahan dunia memberikan respon dalam berbagai bentuk dan saat itu muncul upaya agar Khilafah dapat tegak kembali.¹

Pada dasarnya penghapusan Khilafah ini merupakan persoalan bagi umat Islam di seluruh dunia karena Khilafah merupakan bagian dari keislaman mereka. Selain itu selama ini Khilafah telah berdiri bersama umat Islam berabad-abad lamanya sehingga Khilafah telah menjadi bagian sejarah perjalanan hidup mereka. Tentang hubungan antara umat Islam dan Khilafah serta sebab persoalan penghapusan ini mendatangkan respon, Muhammad Dhiauddin Rais, seorang Guru Besar Jurusan Sejarah Islam Universitas Kairo, di dalam bukunya yang berjudul *al-Islam wal Khilafah fil Ashril Hadits* menjelaskan: “Sesungguhnya Khilafah ini bukan milik Turki saja melainkan milik dunia Islam seluruhnya. Ia adalah sebagian dari warisan umat Islam, peninggalan sejarah dan lambang

¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), 83-6.

persatuan mereka. Khilafah merupakan pimpinan spritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi. Khilafah ini telah berlangsung lebih dari seribu tiga ratus tahun. Yaitu sejak umat Islam mengadakan rapat untuk memilih Abu Bakar Shiddiq (Sahabat Nabi) sebagai pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itulah sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, diikuti oleh Khalifah kedua al-Farq Umar bin Khaththab, begitulah seterusnya silih berganti sepanjang masa, dalam berbagai dinasti sehingga berakhir pada abad keduapuluh ini. Oleh karena itu, wajar jika umat Islam memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal Khilafah ini dan memikirkan akibatnya, serta berpikir apa yang akan terjadi kelak di masa mendatang”.²

Sebab begitu besar pengaruh keberadaan Khilafah bagi umat Islam maka berita keruntuhan Khilafah ini mendapatkan respon dari dunia Islam dan muncul upaya untuk menegakkan Khilafah kembali. Beberapa saat setelah diruntuhkan, ide untuk menegakan kembali Khilafah langsung bergulir dan terus diperbincangkan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia.

Upaya untuk menegakkan kembali khilafah ini berimplikasi pada sebuah konsepsi yang menyatakan bahwa agama adalah politik (kekuasaan), sehingga wajib menegakkan negara atas dasar agama, bahwa agama harus diwujudkan dalam pengolahan dan penyelenggaraan kenegaraan atau *din wa daulah*. Konsepsi keilmuan yang dirumuskan dalam politik Islam (*imamah*) tersebut berupaya

² Dhiauddin Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 45.

merefleksikan usaha pemberian landasan intelektual dalam memenuhi tujuan yakni menegakkan kembali khilafah atau negara Islam.³

Gagasan penegakkan khilafah atau negara Islam merupakan implementasi politik Islam yang didasarkan bahwa Islam mempunyai kemampuan untuk mengatur negara, sebagaimana yang pernah dibuktikan dalam sejarah.⁴ Berangkat dari gagasan tersebut, kemudian muncul para pemikir Islam dan gerakan-gerakan militan Islam yang ingin mendirikan negara Islam atau khilafah.

Munculnya para pemikir Islam dan gerakan Islam yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam dan penerapan syari'at Islam secara total sampai saat ini masih berupa gagasan, konsep dan wacana, dan belum ada satupun negara yang berhasil membentuk negara khilafah yang sah secara konstitusional. Beberapa organisasi yang berideologi Islam, misalnya MMI, Hidayatullah, PERSIS, termasuk Partai Politik nasional seperti PKS. Semuanya mengatakan sistem khilafah itu ada, dan bahkan memperjuangkannya.⁵ Selain itu ada juga gerakan Islam militan yang memperjuangkan negara khilafah, yakni Hizbut Tahrir dibawah ide Taqiyuddin An-Nabhani. Pada prinsipnya Islam militan ini menganggap bahwa banyak negara-negara yang berdasar Islam tetapi justru berpihak kepada sistem *kufur* seperti demokrasi, dan bersekongkol dengan negara sekuler.⁶ Dengan rasa kecewa terhadap negara-negara Islam tersebut, Hizbut Tahrir melakukan serangkaian aktifitas-aktifitas rahasia maupun terbuka untuk

³ Ahmad Jainuri, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam* (Surabaya: LPAM, 2004), 59.

⁴ Dwi Purwoko dkk, *Negara Islam Percikan Agus Salim, Mas Mansur, Muhammad Nasir, Hasyim Asyari* (jakarta: Permata, 2001), 41.

⁵ *Majalah Sabili*, No. 5 Th. XV, 20 September 2007, 22.

⁶ HTI, *Menjaga Kesatuan Negeri-negeri Islam* (Yogyakarta: JEC, 2003), 41.

merebut kekuasaan dan ingin mendirikan khilafah melalui dakwah dan jihad, penerapan syari'at Islam, menegakkan sistem khilafah, aktifitas politik, merubah *darul kufr* menjadi *darul Islam* dan mengambil alih kekuasaan atau perebutan kekuasaan dengan cara mengangkat senjata atau *talabun nusrah* (mendekati penguasa).⁷

Namun, strategi penegakkan khilafah yang digagas oleh Hizbut Tahrir ini berbeda dengan gerakan militan Islam lainnya, seperti halnya Ikhwanul Muslimin dibawah ide Hasan Al-Banna di Mesir. Ikhwanul Muslimin memiliki strategi yang cenderung moderat, tidak menganggap sistem kenegaraan diluar Islam seperti demokrasi sebagai sistem *kufur*, Hal ini dapat dilihat dalam realitas politik Ikhwanul Muslimin yang hendak menerapkan syari'at Islam dan menegakkan khilafah dengan cara mengakomodasi sistem demokrasi atau ikut (pemilu). Di Indonesia, strategi Ikhwanul Muslimin ini diperjuangkan oleh Partai Politik nasional yang berideologi Islam yaitu PKS.

Selain itu ada juga gerakan militan Islam yang memiliki strategi berbeda dari Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, yaitu ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dibawah ide Abu Bakar Al-Baghdadi. Gerakan militan Islam ini pada awalnya merupakan binaan atau ciptaan Al-Qaeda. Sebagaimana Hizbut Tahrir, ISIS juga ingin melaksanakan jihad dalam arti sebagai perang melawan kekuatan anti Islam hingga tegaknya negara Islam.⁸ Namun yang membedakannya dengan gerakan militan Islam lainnya, ISIS menggunakan strategi politik yang

⁷ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 32.

⁸ Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 60.

memaksa, kejam dan brutal, serta memberikan batasan madzhab bagi penganutnya. Hal ini tentu memberikan citra negatif terhadap cita-cita mulia menegakkan khilafah terkhususnya umat Islam.⁹

Meskipun gerakan-gerakan militan Islam tersebut memiliki konsep dan strategi yang berbeda-beda, namun semuanya terbungkus dalam kepentingan yang sama, yakni menegakkan kembali sistem *khilafah 'ala minhajin nubuwwah*.

Berangkat dari konteks penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menjadikan khilafah sebagai objek penelitian, dikarenakan juga khilafah merupakan isu yang menghegemoni dunia saat ini. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana ide khilafah itu bisa masuk di kota dan Kabupaten Kediri atau bagaimana ide khilafah itu disebar luaskan di Kota dan Kabupaten Kediri, hal ini menyangkut cara, pengaruh dan proses masuknya di berbagai instansi. Kemudian peneliti juga ingin mengetahui bagaimana respons Ormas Islam yang ada di Kediri terhadap ide khilafah, karena Ormas Islam inilah yang mengayomi umat beragama yang ada di Kediri terkhususnya umat Islam, dan juga menjadi hakim bagi segala problematika yang menyangkut umat Islam. Peneliti ingin menelisik lebih dalam respons Ormas Islam yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri dan tentunya peneliti ingin bersikap objektif dalam arti tidak memihak pada Ormas Islam tertentu yang dijadikan sebagai subjek informan.

Kemudian alasan kenapa peneliti memilih lokasi penelitian di Kota dan Kabupaten Kediri, hal ini dikarenakan Kediri merupakan Kota dan Kabupaten

⁹ Ali Mustofa Akbar, "Monsterisasi Khilafah (Dibalik Blow-Up ISIS di Indonesia)", *Al-Wa'ie*, No. 169 Th XIX, 1-30 September 2014, 54-56.

nomor satu di Indonesia yang kaya akan keberagaman berbagai isme, yang sampai hari ini masih terjaga. Berangkat dari situ peneliti merasa tertarik untuk mengetahui mekanisme seperti apa yang diformulasikan oleh para tokoh agama, dalam hal ini adalah Organisasi Masyarakat yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri dalam menjaga nilai pluralitas di kota Kediri. Maka peneliti ingin mengangkat isu global kekinian yang dirasa sangat signifikan berkenaan dengan eksistensi kota Kediri, yaitu isu khilafah. Karena keragaman yang ada sekarang bukanlah sebuah jaminan untuk dapat tetap bertahan. Dari sini peneliti mengambil judul penelitian: **“Respon Ormas Islam di Kediri Terhadap Ide Khilafah”**.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian yang peneliti uraikan di atas, ada beberapa fokus penelitian yang ingin peneliti buat sebagai pijakan masalah yang akan peneliti saring dari informan dan tentunya akan dibahas dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana ide khilafah disebarluaskan di Kediri?
2. Bagaimana respons Ormas Islam di Kediri terhadap ide khilafah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ide khilafah disebarluaskan di Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana respons Ormas Islam di Kediri terhadap ide khilafah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur yang memiliki nilai guna dalam memberikan masukan yang bersifat ilmiah dan menambah khazanah keilmuan secara universal. Khususnya dalam kajian Ilmu Perbandingan Agama, sehingga selanjutnya bisa menjadi salah satu rujukan dari penelitian-penelitian setelahnya dengan topik yang sama ataupun yang menyerupainya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai isu khilafah, serta mengetahui bagaimana respon Ormas Islam di Kediri dalam memandang isu khilafah, apakah menerima atau menolak ide khilafah. Untuk selanjutnya peneliti jadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berprilaku.

- b. Bagi Instansi Pendidikan yang ada di masyarakat

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan wawasan keagamaan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya. Dan diharap dapat menjadi referensi untuk dijadikan kebijakan bagi Instansi dalam merespon isu khilafah.